



**BERITA DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO**

**NOMOR : 15**

**TAHUN : 2010**

**SERI : E**

---

**PERATURAN BUPATI KULON PROGO  
NOMOR 17 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH  
DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KULON PROGO,**

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil Daerah, perlu memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- b. bahwa dengan tambahan penghasilan, maka Pegawai Negeri Sipil Daerah harus meningkatkan profesionalismenya untuk memperbaiki pelayanan publik secara optimal;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH.

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNSD adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan ketentuan/peraturan perundang-undangan.

5. Tambahan Penghasilan Pegawai adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNSD dan Calon PNSD berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada saat pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan.

### **BAB II**

#### **PEMBERIAN DAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN**

##### **Pasal 2**

- (1) Tambahan Penghasilan PNSD dan Calon PNSD diberikan setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Ketentuan mengenai besaran dan rincian Tambahan Penghasilan Pegawai yang diberikan kepada PNSD dan Calon PNSD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **BAB III**

#### **KRITERIA**

##### **Pasal 3**

- (1) Pegawai yang berhak menerima Tambahan Penghasilan Pegawai adalah PNSD/Calon PNSD yang sudah mendapatkan penetapan Nomor Induk Pegawai dari Badan Kepegawaian Negara.

- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap :
- a. PNSD/Calon PNSD pada Rumah Sakit Umum Daerah Wates;
  - b. PNSD/Calon PNSD Guru;
  - c. PNSD/Calon PNSD yang tidak masuk bekerja tanpa keterangan yang sah selama paling sedikit 2 (dua) hari dalam setiap bulannya, maka tambahan penghasilan tidak diberikan untuk bulan yang bersangkutan;
  - d. PNSD/Calon PNSD yang sedang menjalani hukuman disiplin pegawai tingkat sedang atau berat; dan
  - e. PNSD/Calon PNSD yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pembebasan dari jabatan, tidak diberikan tambahan penghasilan selama 1 (satu) tahun, terhitung mulai tanggal berlakunya keputusan hukuman dimaksud.
- (3) Tambahan penghasilan pada bulan Nopember dan bulan Desember dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.

#### **Pasal 4**

PNSD/Calon PNSD yang diberhentikan sebagai PNSD/Calon PNSD dengan kriteria meninggal dunia, mutasi keluar Daerah, dan sebab lain yang menyatakan PNSD/Calon PNSD dimaksud tidak aktif lagi, maka tambahan penghasilan dimaksud tidak diberikan terhitung mulai bulan berikutnya yang bersangkutan dinyatakan tidak aktif lagi sebagai PNSD/Calon PNSD pada Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 5**

Pegawai yang mutasi dari luar dan masuk ke dalam lingkungan Pemerintah Daerah, tambahan penghasilan diberikan pada bulan berikutnya terhitung mulai pegawai dimaksud telah nyata-nyata melaksanakan tugas.

#### **BAB IV**

#### **BIAYA**

#### **Pasal 6**

Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diberlakukannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berjalan.

#### **BAB V**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 7**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2009 Nomor 12 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 8**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates  
pada tanggal 3 Mei 2010

**BUPATI KULON PROGO,**

Cap/ttd

**H. TOYO SANTOSO DIPO**

Diundangkan di Wates  
pada tanggal 3 Mei 2010

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

**BUDI WIBOWO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
TAHUN 2010 NOMOR 15 SERIE**